

Pemberdayaan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Empowerment through Family Capacity Building Groups (P2K2) in Karawaci Sub-District, Tangerang City for Beneficiary Families (KPM)

Habibah Mutiara Triano¹, Sari Viciawati Machdum²

^{1,2}Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia; Indonesia

* Correspondence e-mail; habibah.mutiara@ui.ac.id

Article history

Submitted: 2023/04/14; Revised: 2023/06/05; Accepted: 2023/07/11

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a national priority to accelerate poverty reduction. One of the PKH Beneficiary Families' (KPM) obligations to improve this is to attend Family Capacity Building Meetings (P2K2). This study aims to describe the empowerment of KPM PKH through P2K2 in the Karawaci sub-district. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type. Data collection techniques are through in-depth interviews, observation, and document study. The study results show that empowerment through P2K2 for KPM in the Karawaci sub-district has been going well, but until now, there has been no independent graduation of KPM PKH due to P2K2. PKH assistants obstacles in empowering KPM PKH through P2K2, namely the participation and level of understanding of KPM. For this reason, the ability and number of assistants, P2K2 operational funds, facilities, and P2K2 module materials need attention to maximize self-graduation efforts, especially comprehensive attention related to economic aspects in empowering KPM.

Keywords

empowerment; family development session; family hope program; poverty.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri, sesuai dengan taraf hidup kelompok, baik menggunakan tenaga mental maupun fisik yang ada di dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2012). Terdata bahwa jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebesar 0,16 juta pada September 2022, dari 11,82 juta pada Bulan Maret 2022, menjadi 11,98 juta pada September 2022. Sedangkan jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebesar 0,04 juta dari 14,34 juta pada Maret 2022, menjadi 14,38 juta pada September 2022 (BPS, 2022). Wilayah Tangerang pada 2022 menjadi satu-satunya wilayah perkotaan yang paling banyak memiliki jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten (BPS, 2022).

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) per Bulan Mei 2023 di Kota Tangerang sebanyak 40.255 ribu orang dengan jumlah pendamping PKH sebanyak 60 orang (Data PKH Kota Tangerang, 2023). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karawaci yang merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Kota Tangerang, serta memiliki 16 kelurahan. Pada Maret 2020, Indonesia mulai mengalami pandemi Covid-19 yang memiliki dampak pada kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Pemerintah melakukan penanganan dampak pandemi Covid-19 dari sisi perlindungan sosial di antaranya dengan penguatan PKH dengan target penerima dari 9,2 juta KPM, 800 ribu KPM meningkat menjadi 10 juta KPM.

Pembangunan sosial didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana untuk dapat meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan dalam masyarakat. Pembangunan ini melengkapi perubahan proses pembangunan ekonomi dan tidak membuat dikotomi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Untuk meningkatkan taraf hidup, salah satu strategi pembangunan sosial adalah melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Investasi tersebut melalui kegiatan pemberdayaan (Midgley, 1995). Pemberdayaan adalah alat pembelajaran di mana individu belajar mengatur dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam masyarakat pada umumnya (Paskarina, 2007).

Menurut penelitian sebelumnya, P2K2 dan graduasi mandiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku KPM, inovasi pendamping, dan kegiatan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping PKH (Sukesi, 2020). Graduasi menjadi salah satu indikator keberhasilan PKH. Untuk mencapai graduasi mandiri diperlukan adanya pemberdayaan bagi KPM PKH. Penelitian sebelumnya membahas mengenai pemberdayaan KPM PKH dari tiga tahapan, yaitu aras mikro, meso, dan makro (Handayani & Aliyudin, 2020). Sedangkan strategi P2K2 dalam pemberdayaan

masyarakat ada empat tahap, yaitu tahap pemilihan lokasi, tahap sosialisasi, tahap proses pemberdayaan masyarakat, dan tahap kemandirian (Agusrini et al., 2022). Sedangkan penelitian sebelumnya, proses pemberdayaan KPM melalui P2K2 sesi pengelolaan keuangan sudah berhasil dalam membuat anggaran keuangan dan membuat rencana menabung walaupun prosesnya sulit, tetapi hasilnya berdampak positif bagi KPM PKH (Hadistira A.P. & Machdum, 2021).

Untuk mencapai status mandiri, pemberdayaan dilakukan melalui pembelajaran. Semangat, kondisi, dan kemampuan harus selalu dijaga agar tidak terjadi kemunduran dalam menjaga kemandirian tersebut. Salah satu kewajiban KPM PKH dalam bentuk pemberdayaan adalah dengan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) yang diadakan setiap bulan. Beberapa tahun terakhir, pada 2020 P2K2 dihentikan sementara dikarenakan adanya Covid-19. Kemudian pada 2021 mulai dilaksanakan kembali kegiatan P2K2 dengan jumlah yang sesuai walaupun dengan protokol kesehatan.

Pemberdayaan terdiri tiga tahap, yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas diri. Tahap transformasi kemampuan dalam bentuk wawasan pengetahuan dan juga keterampilan, sehingga membuka wawasan dan memberikan keterampilan mendasar. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan, di mana inisiatif dan inovasi dikembangkan untuk mencapai kemandirian (Sulistiyani, 2017).

Berdasarkan hasil riset awal, P2K2 di Kecamatan Karawaci menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu *flipchart* berupa poster dan video. Pendamping PKH mengeluhkan tingkat pemahaman KPM yang berbeda-beda, sehingga pendamping harus mengulang materi yang baru diberikan. KPM juga belum menerapkan materi P2K2 pada kehidupan sehari-hari, misalnya belum mampu mengontrol keinginan dan kebutuhan, menabung, dan lain-lain. Sarana untuk menampilkan video belum memadai, pendamping terkadang tidak memakai proyektor untuk menampilkan video, beberapa pendamping juga memakai laptop sehingga KPM tidak terlihat jelas video yang sedang ditampilkan. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping PKH berlangsung secara bertahap. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan tahap pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Penelitian sebelumnya membahas mengenai tahap pemberdayaan melalui P2K2, peran pendamping PKH dalam P2K2, dan pengaruh pemberdayaan KPM melalui P2K2. Temuan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

pemberdayaan KPM melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci berimplikasi pada perubahan sosial saja, dan belum memperlihatkan implikasinya terhadap perubahan ekonomi, berbagai hambatan dalam pemberdayaan KPM melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci, bagaimana tahapan pemberdayaan KPM melalui P2K2 yang selama ini dilakukan, serta pihak yang terlibat dalam P2K2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang bagi KPM. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman bagi pendamping PKH, pihak-pihak terkait dengan PKH, dan akademisi mengenai pemberdayaan melalui P2K2 bagi KPM.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuan utamanya untuk “menggambarkan” dalam kata-kata atau angka, memberikan profil, klasifikasi, atau langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana (Neuman, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (Neuman, 2014), observasi (Creswell, 2009), dan studi dokumen. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Informan penelitian adalah pendamping PKH Kecamatan Karawaci, KPM PKH Kecamatan Karawaci, dan Koordinator PKH Kota Tangerang.

Teknik analisis data menggunakan *open coding*, di mana hal ini dilakukan di awal pengumpulan data, lalu menemukan tema, dan menetapkan kode awal untuk meringkas banyak data ke dalam kategori. Kemudian pada *axial coding* peneliti mengatur kode, menghubungkannya, dan menemukan kategori analitik yang paling penting. Pada *selective coding* dilakukan dengan meninjau pengkodean yang ada sebelumnya, untuk memilih data dan mengidentifikasi kategori pengkodean konseptual yang mendukung dan yang akan dikembangkan. Sedangkan pada tahap terakhir, peneliti melakukan interpretasi data (Neuman, 2014). Teknik analisis data tersebut dilakukan untuk memilih data yang akan mendukung kategori konseptual untuk menjelaskan dan dikembangkan terkait tahapan pemberdayaan melalui P2K2 bagi KPM di Kecamatan Karawaci.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai kemandirian, secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan dengan melakukan proses belajar (Sulistiyani, 2017). Tahap pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 yaitu sebagai berikut:

3.1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Tahap pertama ini adalah awal dari proses pemberdayaan masyarakat. Pada fase ini pendamping PKH berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan yang efektif. Pendamping memberikan materi modul P2K2 kepada KPM PKH. Table 1 merupakan modul P2K2 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Tabel 1. Modul P2K2

Modul P2K2	Sesi dalam Modul P2K2
Modul 1 Pengasuhan dan Pendidikan Anak	Sesi 1: "Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik" Sesi 2: "Memahami Perkembangan dan Perilaku Anak" Sesi 3: "Memahami Cara Anak Usia Dini Belajar" Sesi 4: "Membantu Anak Sukses di Sekolah"
Modul 2 Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha	Sesi 1: "Mengelola Keuangan Keluarga" Sesi 2: "Cermat Meminjam dan Menabung" Sesi 3: "Memulai Usaha"
Modul 3 Kesehatan dan Gizi	Sesi 1: "Pentingnya Gizi dan Layanan Kesehatan Ibu Hamil" Sesi 2: "Pentingnya Gizi untuk Ibu Menyusui dan Balita" Sesi 3: "Kesakitan pada Anak dan Kesehatan Lingkungan"
Modul 4 Perlindungan Anak	Sesi 1: "Upaya Pencegahan Kekerasan dan Perlakuan Salah pada Anak" Sesi 2: "Penelantaran dan Eksploitasi terhadap Anak"
Modul 5 Kesejahteraan Sosial	Sesi 1: "Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Berat" Sesi 2: "Pentingnya Kesejahteraan Lanjut Usia"

(Sumber: Panduan Teknis Pelaksanaan P2K2, 2020)

Selain 5 (lima) modul di atas, pada Mei 2023 Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial memberikan tugas kepada pendamping PKH untuk melaksanakan P2K2 kepada KPM PKH wilayah dampingan, khususnya modul kesehatan, gizi, dan modul pencegahan serta penanganan stunting. Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait stunting dengan bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Upaya tersebut dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia khususnya melalui PKH (Nadilla, dkk, 2022). Pendamping memberikan materi modul P2K2 dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pendamping menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh KPM PKH. Pemberdayaan melalui P2K2 sangat penting dan perlu dilakukan secara terus-

menerus selama KPM masih menerima bantuan PKH (Kuntjorowati, 2018). Karena P2K2 terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan KPM di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan ekonomi.

Selain modul P2K2 yang harus disiapkan pada tahap prakondisi, pendamping juga menyiapkan *flipchart*, poster, video, buku pintar, dan alat permainan untuk *ice breaking*. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kebosanan dan keletihan pada saat P2K2 serta melatih peserta berpikir secara kreatif. Intervensi yang diberikan pendamping PKH lebih kepada kapasitas afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sejalan dengan penelitian terkait gerakan literasi dalam P2K2 dapat mendorong perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik ke arah yang positif untuk memberikan motivasi agar memiliki kehidupan yang lebih baik (Wijaya, 2019). Penyadaran yang dilakukan pendamping PKH kepada KPM PKH yaitu dengan belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta kesadaran KPM mengenai kondisinya.

KPM PKH belum mempunyai kesadaran untuk berkembang menjadi keluarga yang sejahtera, sehingga pendamping harus dapat memberikan kesadaran KPM bahwa bantuan ini hanya sementara (Firmansyah & Nugroho, 2021). Selain itu, pendamping harus meningkatkan kesadaran KPM terkait pentingnya pengasuhan, pendidikan anak, perlindungan anak, kesehatan, mengatur ekonomi keluarga, serta cara merawat lansia dan disabilitas yang baik.

Kesadaran KPM untuk dapat meningkatkan kapasitas diri melalui P2K2 seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta berikut “Termotivasi ikut P2K2 mbak, soalnya banyak menambah pengetahuan bagi saya. Saya jadi lebih menyadari pentingnya tentang pendidikan anak mbak terus juga cara menabung, mengatur uang.” (CH, KPM PKH, April 2023). Sejalan dengan pernyataan tersebut, pendamping PKH menegaskan bahwa selain karena bantuan PKH adalah bantuan yang bersyarat, maka diharuskan untuk ikut ikut P2K2 agar dapat menambah pengetahuan.

3.2. Tahap Transformasi Kemampuan

Jika tahap pertama sudah terkondisikan, lalu dilakukan tahap kedua untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan dasar, sehingga KPM PKH dapat mengambil peran dalam pembangunan. KPM PKH akan melakukan proses belajar mengenai materi yang ada pada modul P2K2. Pada tahap ini KPM akan mulai menerapkan informasi yang didapatkan dan menguasai keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan. KPM PKH hanya dapat berperan secara partisipatif pada tingkat yang rendah, yaitu objek pembangunan dan belum menjadi subjek pembangunan. Pada kegiatan P2K2 pertemuan berikutnya, pendamping PKH

menanyakan kembali materi yang sudah diberikan pada bulan lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa KPM sudah mulai mengimplementasikan materi yang telah disampaikan oleh pendamping PKH.

Hal ini terlihat dari beberapa KPM yang memperhatikan bagaimana proses pendidikan anaknya, ada keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan menanyakan kepada pendamping terkait beasiswa untuk kuliah; pentingnya gizi untuk ibu hamil, menyusui dan balita; cara mengatur keuangan; serta cara merawat lansia dengan baik. Tetapi dalam penerapannya ada beberapa materi yang belum dapat dilakukan dengan baik salah satunya yaitu KPM dalam merencanakan usaha diperlukan adanya pelatihan lebih lanjut (Permana, dkk, 2018).

3.3. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Tahap ketiga adalah tahap peningkatan intelektualitas dan keterampilan yang diperlukan KPM PKH untuk membentuk kapasitas kemandirian. Hal tersebut ditandai dengan KPM PKH memiliki kemampuan dalam berinisiatif, berkreasi, dan menerapkan inovasi di lingkungannya. KPM PKH pada tahap ini mampu menyebarkan kebiasaan baik pada lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dimulai dari KPM PKH mengajak keluarganya untuk memperhatikan cara mengasuh anak yang baik, tidak memarahi anak secara berlebihan, dan menyadari pentingnya pendidikan anak dengan cara menyekolahkan anaknya. Menurut pendamping PKH, KPM sudah menerapkan materi yang diberikan dan dapat memberikan perubahan bagi KPM, keluarga, dan lingkungannya dalam hal sosial. Sedangkan secara ekonomi, KPM PKH masih belum menerapkan materi dengan baik dikarenakan kurangnya pelatihan dan modal, sehingga belum graduasi mandiri.

Menurut pendamping PKH dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk membentuk kemandirian, melalui pemberian materi P2K2 tidaklah cukup. Untuk mencapai graduasi mandiri, P2K2 bukanlah faktor utama, perlu adanya kegiatan penunjang lainnya seperti pemberdayaan, pelatihan, dan pemberian modal.

“Menurut saya P2K2 ini kan lebih ke arah percepatan perubahan perilaku aja. Graduasi mandiri harusnya ada pemberdayaan untuk KPM, terus juga modal dan lain-lain. Pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh Dinsos (Dinas Sosial), yang UEP (Usaha Ekonomi Produktif) itu mbak, tapi masih terbatas yang ikut cuma perwakilan aja dari kelurahan.” (SY, SDM PKH, Maret 2023).

Sejalan dengan pernyataan dari SDM PKH lainnya bahwa graduasi mandiri tidak hanya kondisi sosialnya saja yang meningkat tetapi ekonominya juga harus meningkat. KPM lebih banyak terbatas pada modal, masih banyak KPM yang belum pernah

melakukan usaha, sehingga perlu dilakukan pelatihan yang dapat meningkatkan ekonomi. Pendamping PKH memiliki empat peran keterampilan, yaitu peran fasilitatif, pendidik, representative, dan teknis (Rahmawati & Kisworo, 2017). Peran fasilitatif dijalankan pendamping PKH dengan memberikan informasi terkait pelatihan dan pemberdayaan untuk KPM. Untuk menginisiasi pengembangan sistem perlindungan sosial secara komprehensif dilakukan dengan mengarahkan KPM kepada bantuan sosial lainnya (Suharto, 2015). Di Kecamatan Karawaci telah ada beberapa kegiatan pelatihan yang dapat mencapai graduasi mandiri KPM.

3.3.1 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang melaksanakan kegiatan PKHP yang khusus dirancang untuk kelompok masyarakat terutama ibu-ibu yang termasuk dalam PKH di wilayah terkait berdasarkan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial Kota Tangerang. Kegiatan PKHP ini dilakukan dalam bentuk pelatihan memasak dan membuat produk makanan yang dibimbing oleh pelatih profesional.

Kegiatan PKHP ini merupakan program unggulan Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka memberikan pelatihan secara berkesinambungan untuk memberdayakan perempuan dan menjadi salah satu bekal usaha UMKM untuk membantu ekonomi keluarga. Peserta yang dipilih hanya 25 orang di setiap kelurahan yang merupakan KPM PKH dan memiliki usia produktif. Kegiatan ini terdiri dari pelatihan membuat *dimsum*, *sisis*, *fish roll*, *puding buah*, *pancake*, dan minuman herbal.

3.3.2 Pelatihan Ekonomi Usaha Produktif (UEP)

Dinas Sosial Kota Tangerang memiliki program kewirausahaan untuk mendukung UMKM yang ada di Kota Tangerang khususnya KPM PKH yang memiliki usaha dagang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan Ekonomi Usaha Produktif (UEP) yang terdiri dari pemberian materi pendampingan UMKM terkait teknis usaha, materi pemasaran produk usaha dan perizinan, serta pelatihan digital *marketing*. Peserta kegiatan ini dipilih dari KPM PKH yang memiliki usaha sebanyak lima orang pada setiap kelurahan di Kota Tangerang.

3.3.3 Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

PENA merupakan program dari Kementerian Sosial yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial, sehingga dapat mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian bantuan usaha. Program PENA mendukung penguatan usaha dan produksi dengan jumlah bantuan sebesar 6 juta per

KPM. Penerima program PENA adalah penerima bantuan sosial aktif yang berusia 20 hingga 40 tahun yang tidak memiliki anggota keluarga yang sudah lansia atau disabilitas dan diharapkan secara sukarela melepaskan ketergantungan pada bantuan sosial, karena sudah mendapat bantuan berupa dukungan penguatan usaha. Terdapat lima kluster usaha untuk program PENA di antaranya makanan, kerajinan, jasa, pertanian, dan peternakan. Penerima program PENA di Kecamatan Karawaci sebanyak 20 orang yang di antaranya adalah penerima PKH murni dan KPM kombo (penerima PKH dan BPNT).

3.4. Pihak yang Terlibat dalam Pemberdayaan KPM melalui P2K2

Pihak yang terlibat dalam memberikan materi P2K2 sejauh ini di Kecamatan Karawaci yaitu pendamping PKH wilayah tersebut dan wilayah lain yang masih dalam lingkup Kecamatan Karawaci untuk membantu memberikan materi P2K2. Beberapa pendamping PKH juga turut mengundang RT, RW, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan aparat kelurahan untuk mengetahui adanya kegiatan P2K2. Pendamping juga memiliki keinginan untuk menghadirkan narasumber khusus di bidangnya, misalnya materi tentang kesehatan atau stunting akan melibatkan Puskesmas, materi ekonomi akan melibatkan Dinas Sosial.

3.5. Hambatan Pemberdayaan KPM melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci

Hambatan pemberdayaan KPM melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci yaitu kurangnya sarana P2K2, partisipasi dan tingkat pemahaman KPM, kemampuan pendamping dan dana operasional P2K2 yang minim, materi modul P2K2 belum komprehensif ke arah graduasi mandiri, serta jumlah dampingan yang tidak ideal.

3.5.1 Kurangnya Sarana P2K2

Hambatan pendamping PKH dalam melakukan pemberdayaan KPM melalui P2K2 yaitu kurangnya sarana seperti proyektor untuk menampilkan video. Terkadang pendamping harus meminjam kepada kelurahan. Beberapa pendamping di Kelurahan Karawaci masih belum menggunakan proyektor, kebanyakan menggunakan laptop, sehingga video yang ditampilkan kurang jelas “Kurangnya sarana seperti proyektor, karena kan kalo lewat laptop mah kecil ya mbak, suka ga keliatan.” (PS, SDM, Maret 2023).

3.5.2 Partisipasi dan Tingkat Pemahaman KPM

Kegiatan P2K2 yang dilakukan setiap satu bulan sekali, masih belum dapat diikuti oleh beberapa KPM dikarenakan dilakukan pada saat jam kerja. Hal ini ditandai dengan

kehadiran KPM yang tidak lebih dari 50% dan tingkat pemahaman KPM berbeda-beda, sehingga pada pertemuan selanjutnya pendamping harus mengulang materi yang sama. Partisipasi KPM juga berkurang dikarenakan saat pandemi tidak melaksanakan P2K2, sehingga setelah pandemi perlu digalakkan kembali untuk melaksanakan P2K2.

3.5.3 Kemampuan Pendamping dan Dana Operasional P2K2 yang Minim

Pendamping PKH merasa perlu adanya peningkatan kapasitas terkait cara penyampaian materi P2K2 pasca pandemi dikarenakan harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan cara menentukan tolak ukur terkait perubahan perilaku KPM. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu bahwa kompetensi dan kapabilitas pendamping PKH masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Dana operasional P2K2 yang digunakan pendamping hanya untuk kebutuhan alat tulis, karton, dan barang pendukung lainnya, sehingga belum bisa digunakan untuk mengundang narasumber yang kompeten dibidangnya.

3.5.4 Materi Modul P2K2 Belum Komprehensif ke Arah Graduasi Mandiri

KPM belum menerapkan materi pada kehidupan sehari-hari karena dirasa cukup sulit terutama pada modul 2 sesi ketiga, “KPM memahami materi apa yang diberikan tetapi masih sulit untuk diimplementasikan mbak.” (PS, SDM, Maret 2023). Materi modul P2K2 terkait graduasi mandiri hanya terdapat pada modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang terdiri dari tiga sesi.

“Dari 14 sesi di materi P2K2 tersebut hanya 3 sesi terkait ekonomi, itu pada modul 2, yang pertama mengelola keuangan, yang kedua menabung dan meminjam, yang ketiga perencanaan usaha. Nah ketika seseorang dia bisa graduasi ketika dia bisa mengelola keuangan, menabung, dan mempunyai usaha. Hanya saja di tiga sesi di P2K2 terkait ekonomi itu belum cukup. Masih membutuhkan *support* (dukungan) yang lain terkait misalnya pelatihan keterampilan usaha, pengelolaan usaha, marketing (pemasaran), dan lain-lain.” (DY, SDM, Maret 2023).

Materi P2K2 perlu ditambahkan lagi terkait peningkatan ekonomi seperti cara pemasaran dan lain-lain.

3.5.5 Jumlah Dampingan Tidak Ideal

Pendamping PKH di Kecamatan Karawaci memiliki jumlah dampingan yang tidak ideal, sehingga tidak menjangkau semua, “Terkait jumlah dampingan, kadang dalam pelaksanaannya karena KPM saya banyak ya mbak jadi kan harusnya dalam

sebulan wajib satu kali melakukan P2K2 ini belum merata dilakukan.” (DY, SDM, Maret 2023).

4. SIMPULAN

Pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci berjalan berdasarkan tiga tahap. Ketiga tahap tersebut lebih berfokus pada pemberdayaan KPM dalam aspek sosial dan pendidikan. Aspek ekonomi menjadi salah satu bagian materi. Namun, penyampaiannya perlu tindak lanjut. Tahap pertama yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku. Pada tahap ini KPM sudah mulai menyadari pentingnya mengikuti P2K2 untuk dapat menambah pengetahuan bagi KPM. Tahap kedua yaitu transformasi kemampuan, di mana pada tahap ini KPM sudah dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mulai mempertahankan pentingnya pendidikan bagi anak serta adanya keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi. Materi mengenai perencanaan usaha juga dilakukan, tetapi diperlukan kegiatan tindak lanjut agar dapat dipraktikkan oleh KPM untuk persiapan graduasi.

Tahap yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan intelektual. KPM PKH di Kecamatan Karawaci belum ada yang terdegradasi mandiri dikarenakan P2K2 KPM sudah menerapkan materi yang dapat memberikan perubahan secara sosial. Namun, perubahan secara ekonomi belum ada. Padahal KPM tidak hanya mendapatkan materi melalui P2K2 saja, tetapi juga ikut dalam pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Pihak yang terlibat dalam pemberdayaan KPM melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci hanya pendamping PKH saja. Terkadang pendamping wilayah lain dilibatkan (masih di Kecamatan Karawaci) untuk membantu memberikan materi P2K2. Selain itu, RT, RW, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan aparat kelurahan diundang untuk mengetahui adanya kegiatan P2K2. Hambatan dalam pemberdayaan KPM melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci yaitu kurangnya sarana P2K2, partisipasi dan tingkat pemahaman KPM, kemampuan pendamping dan dana operasional P2K2 yang minim, materi modul P2K2 belum komprehensif ke arah graduasi mandiri, dan jumlah dampingan tidak ideal.

Pemberdayaan melalui P2K2 PKH bagi KPM belum sepenuhnya mendukung ke perubahan ekonomi hanya ke perubahan sosial saja. Dampak bagi KPM dengan adanya pemberdayaan melalui P2K2 PKH yaitu menambah pengetahuan dan adanya perubahan *mindset* pada KPM. Keterbatasan penelitian hanya pada waktu penelitian. Diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk dapat melakukan wawancara dengan bagian Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan pihak terkait lainnya.

REFERENSI

- Agusrini, dkk. (2022). Strategi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan*. 1 (3) 943-952.
- Asmara, A. Y., Irwantoro, I., Rozikin, M., & Sayyidati, A. (2021). *Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis*. *Cakrawala*, 15(1), 24–42. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.367>.
- BPS Kota Tangerang. (2022). Kota Tangerang Dalam Angka 2022.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. In *Research Design 3rd Ed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, D., & Nugroho, F. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. 20(2), 19.
- Hadistira A.P. & Machdum. (2021). Proses Pemberdayaan Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga Sesi Pengelolaan Keuangan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jpm.v2i2.1018>.
- Handayani, L & Aliyudin. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH)*. 5(1).
- Kementerian Sosial. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan P2K2 PKH*. 15-17.
- Kuntjorowati, E. (2018). Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan melalui Family Development Session. *Jurnal PKS*, 17(2), 89–100.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. SAGE.
- Nadilla, dkk. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Anak Stunting pada Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Pekerjaan Sosial* 5 (1) 17-26.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th*. USA: A Pearson Education Company.
- Paskarina, C. (2007). *Pembangunan Manusia berbasis Investasi Sosial*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.

- Permana, dkk. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. 10 (2).
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia : Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosiohumaniora*. 17 (1) 22-28.
- Sukei. (2020). *Analisis Pengaruh Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) di Jawa Timur*. Cakrawala. 1.
- Sulistiyani. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Wijaya, S. (2019). Gerakan Literasi Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Masyarakat Pra Sejahtera. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*. 4(2), 15.
- Zastrow. Charles. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People, Twelfth Edition*. Boston. USA. Cengage Learning.